

**PENINGKATAN KONFLIK INTERKOMUNAL DI DARFUR DI  
BAWAH OPERASI UNITED NATIONS INTEGRATED TRANSITION  
ASSISTANCE MISSION IN SUDAN (UNITAMS) PERIODE 2020-  
2022**

ADHA ALTAFI THARIQ

ANDI KURNIAWAN

RIZKY HIKMAWAN

Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta

Email: [adhaltf@gmail.com](mailto:adhaltf@gmail.com)

***Abstract: The withdrawal of UNAMID from Sudan faced several obstacles due to an increase in intercommunal conflict. These conflicts rooted from military coup that occurred in 2021 concerning the power struggle of the transitional government related to the people's uprising in 2019 which led to the overthrow of Omar Al-Bashir's government. On the other hand, UNITAMS as a special political mission took over the situation by helping Sudan at their transitional period. This study reveals that the departure of peacekeeping missions from conflicted countries such as Sudan with conditions that have not been fully resolved can create new vulnerabilities that have the potential for other conflicts to arise. The launch of a special political assistance mission in Sudan is considered to be able to relieve the tension so that the country will be both politically and economically stable, considering Sudan needs a lot of help from international community.***

***Keywords: Intercommunal Conflict, UNITAMS, Peace Building, Conflict Resolution***

## **PENDAHULUAN**

Penarikan diri *United Nations – African Union Hybrid Operations in Darfur* dari Sudan menimbulkan sebuah dilema yang cukup besar bagi komponen masyarakat internasional dan juga warga Sudan khususnya Darfur. Ketika UNAMID sebagai agen perdamaian menarik dirinya dari Sudan, hal tersebut akan membuka ruang vulnerabilitas bagi Sudan terhadap konflik-konflik lanjutan yang akan terjadi tanpa adanya campur tangan dari mediator. Sedangkan, posisi pada saat itu, *Government of Sudan* (GOS) atau Pemerintahan Sudan menginginkan UNAMID untuk segera angkat kaki dari Sudan karena mereka menilai campur tangan UNAMID lebih condong kepada kelompok milisia. Keadaan ini seperti menjustifikasi bahwa Pemerintahan Sudan menolak intervensi lanjutan yang akan memiliki pengaruh besar terhadap tatanan pemerintahannya.

Seiring dengan berjalannya tahap proses penarikan *United Nations – African Union Hybrid*

*Operations in Darfur*, telah terjadi peningkatan konflik interkomunal yang diawali pada masa berakhirnya pemerintahan Omar Al-Bashir pada tahun 2019. Lalu pada tahun 2020, lebih tepatnya pada 31 Desember, UNAMID menyatakan bahwa mandatnya telah selesai dan mulai melanjutkan penarikan entitasnya secara berkala. Peningkatan yang terjadi pada aspek *Internally Displaced Persons* (IDPs) atau pengungsi internal mengalami lonjakan yang drastis pada tahun 2021 tepat setelah satu tahun UNAMID menyelesaikan mandatnya dan memutuskan untuk keluar dari Sudan. Hal inilah yang menjadi salah satu kunci isu permasalahan yang muncul dari dilema yang terjadi di antara pihak-pihak terkait.

Kerap kali konflik yang terjadi pada suatu negara menghasilkan konflik lanjutan akibat dari keadaan yang tidak stabil pada negara tersebut. Hal ini dapat terlihat dari guncangan politik seperti pergeseran pemerintahan dan juga tidak stabilnya sektor ekonomi yang akhirnya akanw merembet kepada kehidupan masyarakat sehari-hari.

Berkaitan dengan selesainya mandat dari misi penjagaian perdamaian, timbul pertanyaan mengenai keadaan sebuah negara setelah misi penjagaian perdamaian tersebut selesai. Hal ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Di Salvatore dan Ruggeri (2020) tentang kekuatan warisan misi penjagaian perdamaian setelah mereka menyelesaikan mandatnya untuk menghindari kemungkinan kekacauan terkait dengan penarikan UN PKOs. Dalam penelitiannya, mereka menarik kesimpulan berdasarkan fokus perkembangan PDB, tingkatan demokrasi, otoritas negara, dan kondisi penduduk perempuan bahwa penelitiannya menggambarkan tren positif atas penurunan angka kematian bayi dan perbaikan kelembagaan yang tampak bertahan, meskipun tren pemulihan ekonomi yang diukur dengan pertumbuhan PDB masih belum dapat dipastikan karena

## **PEMBAHASAN**

### **Berakhirnya Misi Penjagaian Perdamaian UNAMID**

Pada tahun 2017, UNAMID melakukan fase pertama dengan

batas ketidakpastian yang cukup besar (Salvatore & Ruggeri, 2020).

Dengan kemunculan *United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Darfur* atau UNITAMS pasca keluarnya UNAMID dari Sudan, sebagai misi politik spesial untuk membantu Pemerintahan Sudan dalam melakukan transisi pemerintahan menjadi lebih demokratis, peneliti berusaha untuk menganalisis mengapa masih terdapat peningkatan konflik interkomunal terlepas dari campur tangan UNAMID dan UNITAMS. Padahal, keluarnya UNAMID dan kemunculan UNITAMS menggambarkan bahwa proses konflik yang terjadi telah dikatakan usai dan Sudan berada pada masa transisi pemerintahan yang dinilai lebih condong ke arah politik dibandingkan intervensi kemanusiaan.

melakukan penarikan personil militer sebesar 44% dan komponen dari kepolisian sebanyak 30% (Sudan Tribune, 2019). Dua fase

yang diadopsi oleh UNAMID ini disebut dengan *two-pronged approach* yang memiliki fokus untuk melakukan penjagaan perdamaian di daerah Jebel Marra dan melakukan stabilisasi serta pengimplementasian pembinaan perdamaian di Darfur dengan menggunakan konsep *whole-of-system* (UNSC, 2021).

Ketidakpastian dari proses politik yang ada di Sudan tercermin dalam pemerintahan Sudan yang sedang dalam masa transisi dari jatuhnya pemerintahan Omar Al-Bashir. Hal ini yang akan mengakibatkan beberapa dampak bagi UNAMID itu sendiri dalam proses transisi penarikan misi perdamaian mereka. Titik frustrasi proses transisi tersebut juga terletak pada sisi penarikan komponen militer dan polisi dengan jumlah yang spesifik dan harus ditarik pada tanggal tertentu, selain itu juga terletak pada sisi sipil mengenai likuidasi aset material dan pengelolaan sumber daya manusia (Razza, 2018).

Tidak hanya permasalahan secara struktural, UNAMID juga

harus menghadapi permasalahan yang muncul dari masyarakat. Pada dasarnya, masyarakat Darfur memiliki kekhawatiran terhadap kepergian UNAMID dari Sudan. Hal ini dapat terlihat dari demonstrasi yang dilakukan di beberapa kamp yang ada di Darfur. Seperti contohnya Kamp Kalma yang terletak di Nyala, Darfur Selatan. Masyarakat yang mengungsi di kamp tersebut melakukan protes terhadap penarikan UNAMID dari Sudan.

Ketidakpercayaan masyarakat Darfur terhadap pemerintahannya sendiri berangkat dari perilaku beberapa pihak selama masa pemerintahan Omar Al-Bashir yang dinilai telah menyengsarakan masyarakat Sudan. Terkait dengan pihak yang dimaksud, merujuk kepada tindakan represif dari *Rapid Support Forces* (RSF) yang beroperasi di bawah kepemimpinan Al-Bashir. RSF sendiri memiliki latar belakang yang kurang baik di mata masyarakat. RSF merupakan satuan paramiliter yang terdiri dari milisi Janjaweed, sebagai salah satu milisi yang memerangi pemberontak pada

konflik yang terjadi di Darfur (Ismail, 2019). RSF juga bertugas sebagai mekanisme satuan pemeriksaan kudeta di bawah pimpinan Al-Bashir yang telah diberikan status *regular force* pada tahun 2015 (Al Jazeera, 2019).

Salah satu konflik lanjutan yang paling membekas di mata komunitas internasional adalah Pembantaian Khartoum atau *Khartoum Massacre* yang terjadi pada 3 Juni 2019, merupakan salah satu tragedi kemanusiaan yang dialami Darfur untuk kesekian kalinya. Kejadian ini pada awalnya diawali dengan gerakan demonstrasi yang dimulai sejak tahun 2018, pada dasarnya, penduduk Sudan melakukan demonstrasi yang diakibatkan oleh inflasi, kenaikan harga BBM dan pangan serta keinginan mereka untuk Omar Al-Bashir turun dari kepemimpinannya. Pembantaian ini dilakukan oleh pasukan keamanan Sudan terhadap demonstran pro-demokrasi yang hadir pada demonstrasi saat itu. Demonstrasi ini terjadi di depan kantor pusat tentara Sudan yang berada pada

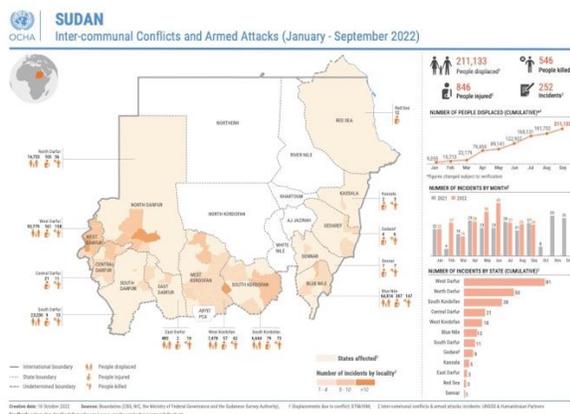
daerah bernama “Al-Qiyada”. Setelah turunnya Omar Al-Bashir dari kekuasaan pada tanggal 11 April 2019, Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan mengambil alih kekuasaan sebagai pemimpin *Transitional Military Council* atau dewan militer transisi bersama dengan Jenderal Mohamed “Hemedti” Hamdan Dagalo sebagai deputinya (Ficke, 2020). Jenderal Hemedti merupakan sosok yang memimpin RSF yang dianggap bertanggung jawab atas Pembantaian Khartoum pada Juni 2019 tersebut.

Dengan berakhirnya masa kerja dari UNAMID yang meninggalkan masalah-masalah yang belum terselesaikan baik secara struktural maupun dari dalam masyarakat itu sendiri, ditambah dengan ketidakpastian proses politik yang sedang berlangsung di Sudan akibat dari pergantian pemerintahan, UNAMID harus tetap menjalankan penarikannya secara berkala.

Instabilitas situasi yang sedang terjadi di Sudan mengharuskan UNAMID melakukan penerapan adaptasi pendekatan dan

sistem dalam waktu jangka yang pendek mengakibatkan hasilnya tidak maksimal. Oleh karena itu, sebagai salah satu alasan juga mengapa dibentuk misi bantuan politik yang dikenal dengan nama UNITAMS yang berupaya untuk membenahi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada saat UNAMID menjalankan tugasnya.

## Meningkatnya Konflik Interkomunal di Darfur



Sumber: (OCHA, 2022)

Berdasarkan visualisasi di atas, menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan dalam kekerasan interkomunal yang telah dibandingkan dari tahun 2021. Peningkatan yang sangat signifikan terdapat pada bulan Februari, Mei, dan Juni, dan selebihnya masih berada pada angka yang konstan.

Darfur Barat menjadi daerah yang memiliki paling banyak konflik diikuti dengan Darfur Utara. Peningkatan ini terjadi akibat dari hasil gagal panen oleh curah hujan yang tidak menentu sehingga menyebabkan petani-petani di sana sulit untuk melakukan cocok tanam. Hal ini mengarah kepada semakin buruknya situasi ketahanan pangan dan keadaan ini juga semakin diperburuk dengan dampak yang diakibatkan dari krisis ekonomi serta inflasi yang tinggi (UNOCHA, 2022). Keadaan di mana sulit untuk mendapatkan pangan akan memberikan percikan terhadap konflik interkomunal yang diikuti oleh meningkatnya permintaan masyarakat Darfur terhadap kebutuhan sehari-hari yang sulit untuk didapatkan.

Menurut laporan misi pencarian fakta yang dilakukan oleh *African Centre for Justice and Peace Studies*, telah muncul pola kekerasan baru yang terjadi setelah lengsernya kepemimpinan Omar Al-Bashir. Kekerasan interkomunal meningkat dua kali lipat pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Setidaknya, dari bulan Juli hingga Desember 2020 telah terjadi 28 konflik interkomunal, sedangkan di tahun 2019 pada periode yang sama telah terjadi setidaknya 15 konflik interkomunal (UNOCHA, 2021). Pola konflik interkomunal ini mengingatkan terhadap pola kekerasan yang terjadi hingga meletusnya pemberontakan Darfur pada tahun 2003. Pola tersebut dapat terlihat dari penyerangan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata “Janjaweed” yang didominasi oleh orang Arab yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil serta kekerasan terhadap wanita. Konflik interkomunal ini meliputi 4 daerah di Darfur, yaitu Darfur Barat, Darfur Tengah, Darfur Utara dan Darfur Selatan. Pada beberapa titik, konflik interkomunal diawali oleh insiden kecil dan meningkat menjadi konflik yang lebih besar dengan cepat.

Pada Desember 2019 tepatnya tanggal 29, terjadi konflik yang berawal dari perselisihan antara anggota suku Masalit dengan suku Arab Rezaigat, yang berujung dengan kematian dari suku Arab.

Kejadian itu memicu kemarahan orang-orang Rezaigat dan memicu pembalasan pada keesokan harinya. Setidaknya sebanyak 30 orang bersenjata dan beberapa menggunakan seragam RSF telah menyerang sebuah pasar yang terletak di Kamp Kirinding. Penyerangan tersebut menghasilkan penjarahan, penghancuran dan pembakaran serta terbunuhnya beberapa pengungsi (International Federation for Human Rights, 2020). Kejadian ini mengharuskan setidaknya sebanyak 48.000 pengungsi harus dilarikan ke daerah Geneina yang terletak di Darfur Barat.

Kejadian tersebut memperlihatkan bagaimana pemerintahan masih memiliki bias yang menunjukkan ketidakadilan terhadap masyarakat Darfur. Hal ini didukung oleh argumen dari Brosché (2015) yang menyatakan bahwa konflik komunal yang dapat merambat kepada konflik yang begitu brutal biasanya dikarenakan terdapat beberapa komunitas yang mendapatkan dukungan dari pemerintah kepada komunitas

tertentu (Brosché, 2015). Ketika terjadi suatu perselisihan, khususnya mengenai tanah dan segala kelangkaan yang terjadi, keadaan ini dapat menjadi lebih baik dan juga sebaliknya, hal ini tergantung kepada bagaimana karakteristik pemerintahan yang melakukan keberpihakan atau tidak.

### **Upaya Pembinaan Perdamaian oleh UNITAMS**

Dalam melakukan analisis terhadap pembinaan perdamaian yang dilakukan oleh UNITAMS di Sudan, peneliti berusaha menggunakan basis teori pembinaan perdamaian milik Lederach (1997) dengan argumen baru dari Paffenholz (2014) terhadap teori pembinaan perdamaian tersebut. Dalam melibatkan masyarakat dan komunitas sipil dalam proses pembinaan perdamaian, Lederach menekankan bahwa pada tingkatan ini, kepemimpinan yang terdapat dalam tingkatan ini memiliki ikatan yang kuat terhadap masyarakat langsung yang mengalami dampak dari konflik. Hubungan mendalam yang terdapat pada pimpinan

dengan komunitasnya menjadikan tingkatan ini mampu untuk melakukan mobilisasi sumber daya lokal dalam mengatasi akar penyebab konflik dan membangun perdamaian.

Sebagai misi politik khusus, penerapan mandat pembinaan perdamaian terhadap UNITAMS merupakan suatu hal kompleks menilai kerangka kerjanya yang terfokus pada proses bantuan politik demi transisi pemerintahan yang baik di Sudan. Namun, penerapan pembinaan perdamaian tetap harus dilakukan dengan kerja sama yang tidak hanya terpaku terhadap pemangku kepentingan PBB saja dan harus meliputi pemangku kepentingan di luar dari PBB. Sejumlah program pembinaan perdamaian yang dilakukan di Sudan merupakan hasil dari kolaborasi antara UNITAMS dan UNCT yang bernama *Sudan Peacemaking, Peacebuilding and Stabilization Programme* (SPPSP) berdasarkan permintaan dari Resolusi Dewan Keamanan PBB 2579 (2021). SPPSP memiliki empat pilar yang menjadi landasannya

dalam melakukan kerangka kerjanya. Hal tersebut meliputi yang pertama, transisi politik, pemerintahan yang baik dan hak asasi manusia. Kedua, mendukung proses perdamaian dan implementasi perjanjian perdamaian. Ketiga, pembinaan perdamaian, perlindungan warga sipil dan aturan hukum. Keempat, mobilisasi bantuan ekonomi dan pembangunan serta koordinasi bantuan kemanusiaan dan pembangunan perdamaian (UN, 2021).

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan fokus penelitian pada pilar ketiga yang berkaitan dengan pembinaan perdamaian dan perlindungan terhadap masyarakat sipil. Kolaborasi kerangka kerja antara UNITAMS dan UNCT ini memiliki tujuan untuk melakukan identifikasi terhadap area aksi bersama yang direncanakan dengan mengoordinasikan program mereka berdasarkan analisis bersama yang mempertimbangkan konteks politik yang berkembang selama masa transisi pemerintahan Sudan. Pada pilar ketiga, UNITAMS berdasarkan

mandat 2579 (2021), UNITAMS akan melakukan pelaksanaan membantu, menasihati dan mendukung kapasitas pemerintahan Sudan dalam membangun lingkungan yang aman dan stabil. Dalam kapasitas ini pula, Resolusi DK PBB 2579 juga menyorot peningkatan konflik interkomunal di Darfur sehingga diperlukannya intensifikasi upaya pembangunan perdamaian demi menghindari terulangnya konflik dan mengurangi risiko bagi masyarakat sipil (UN, 2021). Terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan, hal-hal tersebut meliputi:

1. Mendukung infrastruktur nasional yang telah ada dan mengembangkan strategi perdamaian untuk mengimplementasikan perjanjian perdamaian yang dikalkulasi dengan sistem respons dan peringatan dini.
2. Memperluas partisipasi dan meningkatkan suara masyarakat sipil dalam transisi politik dan proses pembinaan perdamaian.
3. Memperluas otoritas negara, berdasarkan persetujuan

masyarakat dalam memperluas integrasi sosial yang melibatkan lintas garis konflik dalam melindungi warga sipil.

4. Reduksi kekerasan dalam komunitas, sebagai prioritas pada area yang dinilai mengalami intensitas konflik interkomunal yang tinggi.
5. Pemrograman hak asasi manusia atau aturan hukum dan upaya keadilan transisi,
6. Solusi berkelanjutan bagi para pengungsi yang telah kembali, jaminan fasilitas untuk menjamin hak-hak pengungsi dan penduduk lokal.

Berdasarkan poin-poin di atas, pelaksanaan pembinaan perdamaian oleh UNITAMS memiliki cakupan yang terpaku kepada keterlibatan warga sipil untuk melakukan hal-hal seperti reduksi kekerasan komunal melalui integrasi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan perempuan dan pemuda dalam komunitas yang terdapat di Darfur. Hal ini didasari oleh keadaan di mana rezim

sebelumnya yang mengimplementasikan '*morality law*' terhadap perempuan. Hukum moralitas ini membatasi pergerakan dan akses bagi perempuan dalam berpakaian, membuat pergerakan, bekerja, belajar dan menggunakan pelecehan terhadap perempuan sebagai sebuah strategi untuk melakukan intimidasi. Oleh karena itu, pihak komunitas internasional, pemerintah dan komunitas lokal harus berjuang untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dikarenakan keterlibatan perempuan dalam proses pembinaan perdamaian merupakan sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan.

### **Penerapan Resolusi Konflik Transformatif**

Sebelum bergesernya medan partisipasi politik di Sudan yang ditandai dengan keterlibatan perempuan dalam tubuh pemerintahan, UNAMID dan UNITAMS telah melakukan upaya-upaya yang ditujukan untuk mengatasi akar permasalahan khususnya konflik interkomunal di Darfur. Salah satu penyelesaian

permasalahan adalah dengan melakukan resolusi konflik yang didampingi oleh pendekatan terhadap komunitas komunal yang ada di Darfur. Hal ini menjadi sangat krusial dikarenakan komunitas yang terdapat di Darfur memiliki kaitan yang erat terhadap konflik-konflik yang terjadi. Dalam melakukan analisis terhadap resolusi konflik ini, Peneliti menggunakan dasar penelitian dari Hannah M. Smidt (2019) mengenai penggunaan resolusi konflik oleh *UN Peacekeeping Operations* (UN PKOs) yang berusaha untuk mengurangi konflik interkomunal.

Dalam penelitiannya, Smidt menarik kesimpulan bahwa kegiatan dialog antar kelompok lokal UN PKOs dapat membantu mengurangi kekerasan komunal yang terjadi. Hal ini ditarik berdasarkan dua hal, yaitu pertama, bahwa kegiatan dialog antar kelompok menawarkan sebuah fasilitas atau kesempatan bagi tokoh masyarakat atau masyarakatnya yang berbeda untuk bertemu dan mendiskusikan permasalahan konflik lokal. Kedua, kegiatan dialog antar kelompok juga

dapat mengurangi perasaan bias negatif terhadap kelompok lainnya dengan mempromosikan norma-norma hubungan antar kelompok yang damai (Smidt, 2019). Dalam penelitiannya mengenai mekanisme dari memfasilitasi komunikasi secara lokal, Smidt menekankan pengalihan fokus dari kelompok bersenjata dan elit politik menjadi pemimpin komunitas dan masyarakat lokal sebagai lawan bicara penjaga perdamaian. Selain itu, penekanan yang lain terdapat pada bagaimana penjaga perdamaian yang dapat memperkuat mekanisme resolusi konflik lokal dan mengevaluasi aktivitas dialog preventif pada tingkatan lokal. Berdasarkan penekanan ini, dapat terlihat pada bagaimana proses pengalihan fokus yang dilakukan oleh UNAMID dan UNITAMS di Sudan.

Pentingnya kerja sama dengan komunitas lokal dari bawah ke atas atau *bottom-up approach* menjadikan UNITAMS sebagai UN PKO memiliki perhatian yang lebih dalam mendukung komunitas lokal meningkatkan kapasitasnya untuk

proses pembinaan perdamaian. Penggunaan resolusi konflik transformatif dapat berguna untuk menentukan akar penyebab konflik yang bukan hanya gejalanya saja namun juga menyertai penciptaan peluang untuk perubahan dan rekonsiliasi yang lebih mendalam. Daripada hanya menentukan gejala dari sebuah konflik, resolusi ini mengakui bahwa konflik seringkali berakar pada nilai-nilai, keyakinan dan identitas. Pendekatan ini menilai bahwa penanganan faktor-faktor mendasar seperti yang telah disebutkan sebelumnya menjadi sangat penting untuk upaya pembinaan perdamaian yang berkelanjutan.

Penerapan proses pendekatan ini dapat terlihat pada kelanjutan dari konflik interkomunal yang terjadi di Darfur Barat pada daerah Al-Geneina. Pada bulan April 2022, Kepala Kantor Wilayah untuk UNITAMS di Darfur, yaitu Abimbola Aina melakukan kunjungan ke Al-Geneina untuk melakukan penilaian situasi keamanan dan kemanusiaan setelah terjadinya konflik interkomunal yang menyebabkan

perpindahan besar-besaran di antara penduduk sipil. Selain itu, kunjungan ini juga dilakukan untuk melakukan advokasi damai, serta menyampaikan mandat dan kegiatan UNITAMS dan mengidentifikasi keterlibatan dan kerja sama UNITAMS antara otoritas lokal dan pemangku kepentingan lainnya (UNITAMS, 2022). Rangkaian proses ini tercantum pada pendekatan dari bawah ke atas dalam resolusi konflik. UNITAMS melakukan perlibatan komunitas lokal yang dipimpin oleh sesepuh dari komunitas yang memiliki konflik dan meminta perwakilan tersebut untuk memimpin upaya rekonsiliasi di wilayahnya. Keinginan komunitas juga kerap disampaikan bersama dengan bantuan untuk melibatkan perempuan dan pemuda dalam prosesnya. Hal ini berakhir dengan pendirian kantor sekunder di daerah Darfur Barat dalam menyatukan komunitas-komunitas untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dalam permasalahan konflik interkomunal.

Proses di atas merupakan bagian dari pembangunan hubungan dalam resolusi konflik yang sejalan dengan pengakuan keberagaman latar belakang dan budaya. *Recognition of diversity* merupakan hal penting yang terdapat dalam penggunaan resolusi konflik dalam mengatasi konflik interkomunal. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Smidt (2019). Melakukan identifikasi terhadap perbedaan budaya akan mengarah kepada pemahaman bagaimana sebuah komunitas memiliki permintaan yang berbeda, baik dalam konteks kehidupan sosial, maupun dalam proses berpolitik. Perbedaan-perbedaan ini layak untuk diperhitungkan dalam proses resolusi konflik demi mencapai pembuatan kesepakatan yang mencakup seluruh permintaan komunitas yang ada di Darfur.

Penerapan pembinaan perdamaian dan resolusi konflik setelah UNITAMS mengambil alih peran dari UNAMID dapat terlihat pada periode 2021 dan 2022 dari jumlah pengungsi internal yang cenderung menurun. Pada tahun

2021 sendiri, setidaknya terdapat 442.000 *Internally Displaced Persons* (IDPs) yang diakibatkan oleh konflik interkomunal. Sedangkan pada Januari – Desember 2022 diperkirakan terdapat 310.000 orang yang mengungsi akibat dari konflik interkomunal yang terjadi di Sudan (OCHA, 2023). Angka penurunan tersebut menunjukkan bagaimana proses penerapan resolusi konflik yang diimplementasikan oleh UNITAMS dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah memiliki dampak yang cukup signifikan.

### **Hambatan Pemerintahan Sudan Dalam Membendung Konflik Interkomunal**

Melihat selarasnya penerapan pembinaan perdamaian dalam mengatasi peningkatan konflik interkomunal oleh UNITAMS di Darfur dan beberapa daerah lainnya di Sudan, kerap kali banyak pertimbangan yang perlu diperhatikan dengan melihat potensi-potensi hambatan yang akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap

proses pembinaan perdamaian yang dilakukan. Penyebab yang mendasari terjadinya konflik tersebut menjadi salah satu target sorotan bagi UNITAMS dan Pemerintah Sudan untuk menentukan kemana arah pembinaan perdamaianya. Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti mendapatkan beberapa poin penting yang dinilai menjadi penghambat dalam proses pengurangan maupun pencegahan konflik interkomunal.

**1. Perbedaan dan Keragaman Budaya secara Historis,** Secara historis, Sudan memiliki perbedaan kebudayaan yang sangat beragam, hal ini dapat menjadi pengaruh yang sangat signifikan kepada hasil pembinaan perdamaian yang dilakukan oleh UN PKO maupun pemerintahan Sudan itu sendiri. Setelah kemerdekaannya pada tahun 1956, Sudan kerap kali mengalami beragam permasalahan pada bidang agama dan politik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sami Saeed (2023), mengenai pengelolaan keragaman populasi secara geografis, multikultur, multi-

etnis dan multibahasa dalam proses transisi pemerintahan Sudan, menemukan bahwa Sudan masih memiliki banyak celah dalam mengelola keragaman secara damai (Saeed, 2023).

**2. Keterbatasan Sumber Daya,** Ketidakstabilan yang terjadi di Sudan tidak jauh dari konflik yang terjadi akibat perebutan atas sumber daya. Berdasarkan penelitian dari *United Nation Environment Programme* (UNEP) menunjukkan bahwa setidaknya sekitar 40% interkomunal konflik yang terjadi berakar dari permasalahan eksploitasi sumber daya seperti kayu, intan, emas dan minyak serta sumber daya yang langka seperti tanah dan air (United Nations Environment Programme, 2022). Contohnya adalah seperti konflik yang terjadi di Nil Biru (Blue Nile) di mana kehidupan dan aktivitas perekonomian di daerah tersebut bermuara pada sektor agrikultur dan peternakan. Menurut Abuelgasim Adam sebagai perwakilan UNEP di Sudan, memberikan pernyataan bahwa konflik yang terjadi di daerah Wad Al Mahi pada Juli 2022

merupakan konflik yang didasari oleh perebutan kekuasaan wilayah dengan sumber daya memainkan peranan penting dalam dinamika konflik tersebut (Adam, 2022).

**3. Kompleksitas Partisipasi Politik,** Tidak dapat dipungkiri bahwa partisipasi politik di Sudan memiliki kompleksitasnya sendiri. Seiring dengan penerapan demokrasi di Sudan melalui pemerintahan transisi, partisipasi politik menjadi hal yang sangat krusial dalam menentukan keberhasilannya. Perjuangan pemerintahan Sudan dalam mengubah haluan partisipasi politik mengalami hambatannya sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan perbedaan yang muncul antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses transisi tersebut. Komunitas internasional, khususnya PBB telah memfokuskan agenda untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik di Sudan. Namun, akibat beberapa hal terkait dengan peninggalan rezim sebelumnya, terdapat pihak-pihak yang sulit untuk melakukan adaptasi terhadap peranan perempuan dalam dimensi politik.

**4. Lingkungan Keamanan yang Menantang,** Terbatasnya alat seperti kendaraan dan sumber daya lainnya untuk melakukan transportasi dalam melakukan bantuan kemanusiaan menghambat proses penguatan kapasitas daerah-daerah yang terkena dampak konflik. Komunitas internasional juga kerap mengalami kejadian-kejadian tidak terduga ketika sedang melaksanakan tugasnya di lapangan, baik dari penjarahan, perusakan dan perampasan barang-barang atau alat yang menjadi inventaris dari pihak keamanan. Kejadian seperti ini yang membuat keadaan lingkungan keamanan di Sudan menjadi lebih menantang melihat faktor-faktor tersebut yang menyebabkan tidak meratanya akses bantuan kemanusiaan.

**5. Ketergantungan Terhadap Pihak Eksternal,** Dalam rangka memenuhi pembangunan berkelanjutan di Sudan, diperlukan kesadaran terhadap isu ketergantungan terhadap bantuan internasional. Hal ini berangkat dari gagasan bahwa bantuan asing dapat merugikan institusi politik suatu negara akibat

dari efek sampingnya. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Jones & Tarp (2016) mengenai keterkaitan bantuan asing terhadap institusi politik suatu negara, mereka menyimpulkan data yang ada tidak memperlihatkan bahwa bantuan asing telah memberikan dampak buruk terhadap institusi politik suatu negara (Jones & Tarp, 2016). Meskipun demikian, kita tidak dapat mengesampingkan hal tersebut. Perlu diadakan kajian yang lebih mendalam mengenai kasus ketergantungan dengan melihat faktor-faktor yang lebih mendalam seperti latar belakang dan penyebab masalah yang terjadi menilai keadaan di Sudan yang fleksibel terhadap perubahan. Hal ini dapat menjadi referensi untuk ke depannya dalam menghindari budaya ketergantungan oleh masyarakat sehingga mereka tidak gagal dalam mengembangkan keterampilan dan sumber daya untuk menopang kehidupan mereka.

Berdasarkan penjelasan pada bab di atas, dapat diketahui bahwa dalam rangka upaya pembendungan konflik di Sudan, pemerintahan

Sudan memiliki hambatannya tersendiri. Hambatan-hambatan ini juga datang dari faktor yang tidak selalu terpaku dari perbuatan manusia, faktor alam seperti bencana alam juga memiliki andilnya tersendiri dalam menambah tantangan untuk melakukan pengelolaan konflik. Meskipun demikian, semua faktor ini memiliki keterkaitannya tersendiri bagi pemerintahan Sudan maupun pihak eksternal sebagai agen perdamaian di Sudan. Dalam penanganan peningkatan konflik interkomunal itu sendiri, beberapa faktor hambatan dapat dicegah dengan melakukan implementasi kebijakan yang menyesuaikan keinginan dan keadaan masyarakat Sudan dengan sama rata. Selain itu, penerapan resolusi konflik yang meliputi akses bagi tingkatan akar rumput atau masyarakat biasa untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik juga dapat mengeliminasi hambatan dalam membendung konflik. Hal ini merupakan tindakan yang krusial menilai bahwa penyelesaian konflik yang menyeluruh merupakan bagian

dari proses pembinaan perdamaian yang diinginkan oleh semua pihak.

## **KESIMPULAN**

Peningkatan konflik interkomunal setelah diterapkannya misi penjagaan perdamaian *United Nations - African Union Hybrid Operation in Darfur* (UNAMID) di Sudan merupakan sebuah fenomena konflik lanjutan yang terjadi di luar dari kendali misi penjagaan perdamaian PBB. Sebagai pihak yang menangani proses penjagaan perdamaian, segala bentuk pembinaan dan bantuan telah diterapkan demi meredam konflik yang terjadi baik antara kelompok bersenjata dengan pemerintah maupun antara kelompok-kelompok komunal. Namun, proses PBB dalam menciptakan kedamaian berkelanjutan di Sudan tidak hanya sampai kepada UNAMID saja, peluncuran misi bantuan politik yaitu *United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan* (UNITAMS) merupakan salah satu bentuk bantuan misi politik untuk Sudan dalam masa transisi ke pemerintahannya. Dalam masa

pemerintahan transisi menuju pemerintah yang lebih demokratis, pemerintahan Sudan dibantu oleh UNITAMS saat mereka dalam keadaan yang rentan dalam bidang sosial, politik dan ekonominya. Situasi juga diperburuk oleh kehadiran pandemi COVID-19 yang berdampak besar bagi kelancaran bantuan kemanusiaan oleh komunitas internasional. Hal ini menimbulkan pembagian bantuan yang tidak merata ke seluruh daerah di Sudan yang menyebabkan tensi konflik antara masyarakat semakin meningkat.

Proses pembinaan perdamaian yang dilakukan oleh UNITAMS dan pihak-pihak komunitas internasional yang terlibat menggunakan konsep resolusi konflik ini mengikutsertakan faktor penting dalam pembinaan perdamaian yaitu tingkatan rumput alias masyarakat Sudan itu sendiri. Dengan melibatkan masyarakat baik dalam proses politik dan pembentukan kebijakan lainnya, potensi untuk mencapai kesepakatan yang setara akan lebih tinggi. Hal ini juga termasuk kepada

keterlibatan perempuan serta pemuda dalam partisipasi politik yang dinilai sebagai faktor penting dalam pembinaan perdamaian. Hal tersebut juga didukung oleh mandat dari UNITAMS yang menekankan partisipasi politik oleh perempuan sebagai bentuk pembinaan perdamaian menuju Sudan yang lebih demokratis. Keterlibatan masyarakat sipil dalam ranah pemerintahan di Sudan memiliki sejarahnya sendiri. Seperti pembentukan *Forces of Freedom and Change* (FFC) yang berhasil menjadi wadah masyarakat sipil untuk memberikan suaranya dalam proses perpolitikan. FFC juga menjadi salah satu faktor berhasilnya Revolusi Sudan pada tahun 2019 yang melengserkan Omar Al-Bashir dari kekuasaannya. Dalam konsep resolusi konflik dan pembinaan perdamaian, hal ini dinilai merupakan salah satu kemajuan dalam menuju perdamaian berkelanjutan di Sudan.

Secara keseluruhan, Peneliti menemukan bahwa aspek-aspek yang menyebabkan meningkatnya konflik interkomunal di Darfur

meskipun telah dilakukan penyebaran penjaga perdamaian tidak hanya terpaku pada perubahan di antara pemangku kepentingan, melainkan harus terdapat kesadaran dan perubahan dari bawah ke atas secara merata yang melibatkan partisipasi masyarakat. Perlu diketahui juga bahwa serangkaian kebijakan yang ditentukan akan memiliki dampak langsung yang luas bagi kehidupan masyarakat. Dengan kepergian penjaga perdamaian, sudah seharusnya terdapat resolusi konflik yang telah diterapkan untuk mengurangi potensi konflik lanjutan. Namun, peningkatan konflik interkomunal yang terjadi menggambarkan bahwa masyarakat masih memiliki ikatan dan kepercayaan yang kuat terhadap pasukan penjaga perdamaian dari PBB tersebut. Disamping penanganan yang kurang matang tersebut, PBB telah melancarkan operasi bantuan politik seperti UNITAMS yang telah menjadi aset penting dengan menjadi bagian pembinaan perdamaian di Sudan. Tanpa kehadiran UNITAMS sebagai

mitra dalam membangun perdamaian dan bantuan bagi transisi pemerintahan, terdapat kemungkinan bahwa Sudan akan mengalami ledakan konflik yang menyebabkan instabilitas keamanan dan meningkatnya jumlah IDPs meskipun UNAMID telah melakukan tugasnya selama belasan tahun.

## REFERENSI

ACLED. (2019, July 2). *The Rapid Support Forces and the Escalation of Violence in Sudan*. Retrieved from ACLED: <https://acleddata.com/2019/07/02/the-rapid-support-forces-and-the-escalation-of-violence-in-sudan/>

Adam, A. (2022, November 4). *In Sudan, conflict and environmental decline go hand in hand*. Retrieved from UNEP: <https://www.unep.org/news-and-stories/story/sudan-conflict-and-environmental-decline-go-hand-hand>

Al Jazeera. (2019, June 4). *After bloody attack, Sudan army scraps agreements with protesters*. Retrieved from Al Jazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2019/6/4/after-bloody-attack-sudan-army-scraps-agreements-with-protesters>

Al Jazeera. (2019, June 6). *Who are Sudan's RSF and their commander Hemeti?* Retrieved from Al Jazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2019/6/6/who-are-sudans-rsf-and-their-commander-hemeti>

BBC. (2019, July 20). *Sudan crisis: The ruthless mercenaries who run the country for gold*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/news/world-africa-48987901>

Bräutigam, D. A., & Knack, S. (2004). Foreign Aid, Institutions, and Governance in Sub-Saharan Africa. *Economic Development and Cultural Change*, 255-285.

Brosché, J. (2015). *Causes of Communal Conflicts – Government Bias, Elites, and Conditions for Cooperation*. Retrieved from diva-portal: <http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:899332/FULLTEXT01.pdf>

Dabanga Sudan. (2020, December 14). *Darfur sit-in against UNAMID withdrawal continues*. Retrieved from Dabanga Sudan: <https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/darfur-sit-in-against-unamid-withdrawal-continues>

Ficke, A. (2020, March 5). *Physicians for Human Rights*. Retrieved from "Chaos and Fire": An Analysis of Sudan's June 3, 2019 Khartoum Massacre: <https://phr.org/our-work/resources/chaos-and-fire-an-analysis-of-sudans-june-3-2019-khartoum-massacre/>

Garfield, R., & Polonsky, J. (2010). Changes in Mortality Rates and Humanitarian Conditions in Darfur, Sudan 2003-2007. *Prehospital and Disaster Medicine*, 496-502.

International Federation for Human Rights. (2020, February 3). *West Darfur: Investigation Into Krinding Camp Massacre Is Urgently Needed*. Retrieved from FIDH: <https://www.fidh.org/en/region/Afri>

- ca/sudan/west-darfur-investigation-into-krinding-camp-massacre-is-urgently
- International Peace Institute. (2021, May). *Prioritization and Sequencing of Security Council Mandates: The Case of UNITAMS*. New York: The Stimson Center. Retrieved from <https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2021/05/IPI-E-RPT-The-Case-of-UNITAMS-5.pdf>
- Ismail, N. (2019, Juni 9). *Sudan eyewitness: Militiamen raped men, women*. Retrieved from Deutsche Welle: <https://www.dw.com/en/militiamen-in-sudan-raped-men-and-women-says-eyewitness/a-49120693>
- Jones, S., & Tarp, F. (2016). Does foreign aid harm political institutions? *Journal of Development Economics*, 266-281.
- Khalifa, A. (2020, June 1). *Sudan's Transition: Challenges and Opportunities*. Retrieved from The Washington Institute - FIKRA Forum: <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/sudans-transition-challenges-and-opportunities>
- Kimani, M. (2022, May 24). *Lack of Progress on Political Track Will Lead to Humanitarian Disaster in Sudan, Secretary-General's Special Representative Warns Security Council*. Retrieved from United Nations: <https://press.un.org/en/2022/sc14901.doc.htm>
- Lederach, J. P. (1997). *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington DC: United States Institute of Peace Press.
- OCHA. (2022, October 11). *Sudan: Inter-communal Conflicts and Armed Attacks (January - September 2022)*. Retrieved from OCHA: <https://reports.unocha.org/en/country/sudan/>
- OCHA. (2023, February 16). *Sudan: Sudan Humanitarian Update, December 2022*. Retrieved from OCHA: <https://reports.unocha.org/en/country/sudan/card/4dLhMJ13kO/>
- Paris, R. (2014). The 'Responsibility to Protect' and the Structural Problems of Preventive Humanitarian Intervention. *International Peacekeeping*, 569-603.
- Razza, N. D. (2018). Mission in Transition: Planning for the End of UN Peacekeeping in Haiti. *International Peace Institute*, 1-48.
- Rift Valley Institute. (2022). What next for the Juba Peace Agreement? Evolving political and security dynamics in Darfur. *Rift Valley Institute Briefing Paper* (pp. 1-5). Cross-Border Conflict Evidence, Policy and Trends.
- Saeed, S. (2023). Diversity management in Sudan's Democratic Transitional Arrangements. *International Institute for Democracy and Electoral Assistance*, 1-16.
- Salvatore, J. D., & Ruggeri, A. (2020). The Withdrawal of UN Peace Operations and State Capacity: Descriptive Trends and Research Challenges. *International Peacekeeping*, 1-10.
- Smidt, H. M. (2019). United Nations Peacekeeping Locally: Enabling Conflict Resolution, Reducing Communal Violence. *Journal of Conflict Resolution*, 344-372.
- Sudan In The News. (2021, January 24). *DARFUR REPORT 2: UNAMID withdraws, key issues and proposed solutions*. Retrieved from Sudan In The News: <https://www.sudaninthenews.com/darfur-report/darfur-report-2->

- unamid-withdraws-key-issues-and-proposed-solutions  
Sudan In The News. (2022, May 20). *Sudan diplomatic briefing: Challenges facing UNITAMS after the military coup in Sudan*. Retrieved from Sudan In The News:  
<https://www.sudaninthenews.com/diplomatic-briefings/unitams-sudan-coup>
- Sudan Tribune. (2019, March 29). *UNAMID to fully exit three Darfur states by June*. Retrieved from Sudan Tribune:  
<https://sudantribune.com/article65430/>
- UN. (2021, October 23). *Sudan Peacemaking, Peacebuilding and Stabilization Programme*. Retrieved from United Nations Sudan:  
<https://sudan.un.org/sites/default/files/2022-05/2021.10.23%20SPPSP.pdf>
- UNEP & EU. (2022, July). *EU-UNEP Climate Change and Security Project: Building Resilience to Climate-related Security Risks in North Darfur, Sudan*. Retrieved from United Nations Environment Programme:  
[https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/40328/climate\\_Sudan.pdf?sequence=3&isAllowed=y](https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/40328/climate_Sudan.pdf?sequence=3&isAllowed=y)
- UNITAMS. (2022, November 29). *Community-oriented Policing Will Help Building Trust Between State Authorities and Communities*. Retrieved from United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan:  
<https://unitams.unmissions.org/en/community-oriented-policing-will-help-building-trust-between-state-authorities-and-communities>
- UNITAMS. (2022, April 14). *Head of UNITAMS Regional Office in Darfur Assesses Security and Humanitarian Situations in West Darfur State*. Retrieved from United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan:  
<https://unitams.unmissions.org/en/head-unitams-regional-office-darfur-assesses-security-and-humanitarian-situations-west-darfur-state>
- United Nations Environment Programme. (2022, November 4). *In Sudan, conflict and environmental decline go hand in hand*. Retrieved from UNEP: <https://www.unep.org/news-and-stories/story/sudan-conflict-and-environmental-decline-go-hand-hand>
- United States Institute of Peace. (2020, May 1). *Sudan, One Year After Bashir*. Retrieved from United States Institute of Peace:  
<https://www.usip.org/publications/2020/05/sudan-one-year-after-bashir>
- UNOCHA. (2021, Januari 17). *Inter-communal violence increased in Darfur during the second half of 2020*. Retrieved from UNOCHA:  
<https://reports.unocha.org/en/country/sudan/card/1R5yoxqxpR/>
- UNOCHA. (2022, March 27). *Sudan: Humanitarian Update, February 2022 (No. 02) 1 – 28 February 2022*. Retrieved from UNOCHA:  
<https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-humanitarian-update-february-2022-no-02-1-28-february-2022>
- UNSC. (2021, December 29). *S/2021/1099*. Retrieved from <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/42>

2/89/PDF/N2142289.pdf?OpenElement